

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) merupakan sekolah pelatihan untuk menjadi pegawai pemerintah dari kalangan pribumi. Sekolah ini menjadi istimewa karena menjadi satu-satunya pendidikan menengah yang mengantarkan cita-cita sebagai pangreh praja. Para murid OSVIA merupakan lulusan dari HIS, yang mana hanya murid-murid kalangan bangsawan pribumi yang dapat melanjutkan pendidikannya di OSVIA.

Tujuan didirikan OSVIA yaitu untuk mencetak tenaga kepegawaian Belanda (*ambtenaar*) yang siap dipekerjakan dibawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Jabatan birokratis seperti bupati, patih, wedana dan jabatan lainnya merupakan hasil dari pendidikan OSVIA¹.

Secara umum, sistem birokrasi pada masa kolonial mempunyai dua pamong praja yang terpisah. Adapun yang pertama adalah Binnenlands Bestuur atau pemerintahan dalam negeri yang ditempati oleh orang Belanda yang jabatannya seperti *Gouverneur* (Gubernur), *Resident*, dan *Assistant Resident* dengan tujuan untuk mengawasi para pejabat pribumi. Kedua, Pangreh Praja atau pemangku kerajaan yaitu para pejabat yang berasal dari kaum elite pribumi seperti Patih, Wedana, Asisten Wedana, Camat, Kepala Kampung atau Kepala Desa.

Keduanya memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi proses pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Kaum elite pribumi ini

¹ Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm 39.

nantinya menempati posisi sebagai bupati yang bertanggung jawab atas wilayah kabupaten, wedana atau kepala kawedanaan, dan asisten wedana. Kaum elite pribumi ini juga disebut dengan kalangan elite Jawa atau Priyayi.²

Pada masa kolonial, sistem pendidikan di Hindia Belanda lebih banyak disesuaikan dengan kepentingan penjajah dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.³ Pemerintah kolonial secara sistematis memasukkan paham mereka dengan menanamkan superioritas budaya Barat melalui pendidikan sekolah rakyat kepada penduduk pribumi Pemerintah kolonial juga mendidik para calon tenaga terampil di bidang administrasi dan kejuruan yang diperlukan dalam menjalankan usahanya.

Pendirian OSVIA berdasarkan surat keputusan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1891 mengenai tenaga pemerintahan dalam negeri (Bestuurambtenaren), yang menjelaskan bahwa semua calon pejabat pribumi harus merupakan lulusan dari pendidikan formal dalam bidang pemerintahan (*Besluit van Binnenlandsch Bestuur*, 25 Desember 1891). Keputusan tersebut dibuat oleh komisi pejabat Hindia Belanda untuk mempersiapkan tenaga kerja terdidik yang dapat bekerja secara maksimal serta menguasai bidangnya dalam jabatan pemerintahan kolonial Belanda.⁴

² Martinus Danang Pratama Wicaksana. Politik Dinasti: Strategi Kolonial Mengendalikan Elite Pribumi di Jawa. <https://www.kompas.id/baca/buku/2021/09/25/strategi-kolonial-melanggengkan-politik-dinasti-di-jawa> (diakses pada 26 Juli 2022, pukul 21.59)

³ Ahmad Fakhri Hutaeruk, *Sejarah Indonesia: Masuknya Islam Hingga Kolonialisme*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm 2

⁴ Riski Putri Utami, dalam Skripsi “*Opleiding School Voor Indlansche Ambtenaren (OSVIA) : Pendidikan Bagi Calon Pejabat Pribumi di Madiun 1900-1930*”, (FIB UNAIR, Surabaya) bab 2, hlm 14

Didasarkan dari RUU tentang Reorganisasi Administrasi Publik di Hindia Belanda tanggal 7 dan 14 September 1911, dikatakan bahwa terdapat sebanyak 3 RUU Persatuan pegawai negeri sipil di Administrasi Dalam Negeri. Dalam Persatuan Pegawai Negeri Sipil pada Administrasi Dalam Negeri terdapat sebanyak 413 anggota korps di dalamnya. Anggota-anggota tersebut mengajukan petisi yang ditujukan pada Menteri agar mereka dapat diberitahukan tentang tertundanya proposal yang termasuk juga catatan-catatan yang harus dicetak di Kantor Cetak Tanah yang berada di Batavia, dan mereka bisa mendapatkan jawaban yang mereka inginkan secepatnya.

Selanjutnya sebagai jawaban atas hal tersebut maka didapatkan adanya keputusan bahwa suatu RUU akan segera diserahkan kepada Majelis Rendah yang ada. Di mana adanya hal tersebut tujuannya adalah dua hal, yakni untuk meningkatkan nasib pejabat yang ada di Jawa dan juga Madura, serta untuk pembentukan posisi Komisariss Pemerintah dalam persiapan dan pengelolaan reorganisasi⁵

Pendidikan di Jawa Barat, khususnya di Banten hanya ada 2 sekolah di mana Serang merupakan daerah yang dapat mengawasi daerah lain, sehingga dapat dibentuk OSVIA untuk dapat memenuhi kebutuhan akan pegawai Hindia Belanda di Serang.

Tujuan pendirian lembaga pendidikan oleh Belanda adalah untuk mendidik tenaga kerja yang akan mengerjakan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda. Kepentingan untuk mencari pegawai yang murah agar dapat dijadikan pegawai tanpa mendatangkan pegawai dari Negeri Belanda. Oleh karena itu,

⁵ Koleksi Arsip www.delpher.nl “Verschenen beschouwingen betreffende het Wetsontwerp tot reorganisatie van het bestuurswezen In Ned Indie” tahun 1911 diakses tanggal 21 Maret 2019

Belanda membentuk sekolah Pangreh Praja untuk memenuhi kebutuhan pegawai dengan harga yang murah. Belanda kemudian mendirikan sekolah Pangreh Praja di Serang Banten.

Pendirian sekolah-sekolah di Banten pada awalnya ditujukan untuk anak-anak Belanda yang orang tuanya bekerja di daerah Karesidenan di Banten, baik yang bekerja di pabrik atau bekerja sebagai Pegawai Pemerintahan di Hindia Belanda. Sekolah untuk golongan pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda terdapat di Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Rangkasbitung. Anak-anak pribumi bisa sekolah di Bumiputera (*Inlandsche School*) kelas dua (*Tweede Klasse*) atau yang dikenal dengan Sekolah Angka Loro, atau di Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat (*Volksschool*). Sekolah Desa pertama didirikan di Hindia Belanda tahun 1907. Sekolah semacam ini pada awal abad ke-20 jumlahnya sudah cukup banyak di Karesidenan Banten.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan penyelenggaraan sekolah yang dilakukan Belanda tidak murni semata-mata sebagai pemberdayaan pendidikan kepada masyarakat, melainkan untuk menghasilkan tenaga birokrat (level pendidikannya) untuk dapat direkrut dalam jabatan-jabatan teknis di Pemerintahan Kolonial Belanda. Sebagai contoh, sejak tahun 1864 oleh Belanda telah meintroduksi sebuah program ujian yang disebut *Klein Ambtenaars' Examen*, yaitu sebuah program ujian pegawai rendah yang harus ditempuh oleh seseorang agar dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Oleh karena itu, nampak jelas bahwa program untuk menciptakan birokrat rendahan cukup menonjol, apalagi setelah tahun 1900 diperkenalkan sekolah *Opleiding School voor*

Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), yaitu sebuah sekolah yang dipersiapkan menjadi pegawai pemerintah untuk kalangan pribumi. Dengan demikian terdapat kesan bahwa kegiatan pendidikan adalah untuk kelancaran ekonomi dan politik Belanda. Di abad ke-20 ini para pangreh praja hasil dari pendidikan Belanda memainkan peran yang penting, tidak hanya sebagai perpanjangan tangan Belanda namun juga sebagai pelayan masyarakat pribumi.

Hubungan antara sekolah dan transformasi masyarakat secara umum, hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam konteks kolonial, dan transisi dari sekolah kolonial ke sekolah pasca-kolonial. Ada dua dimensi dalam hubungan antara pendidikan dan transformasi masyarakat. Pendidikan adalah objek masyarakat yang dipengaruhi oleh dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Pendidikan merupakan motor penggerak dalam transformasi masyarakat. Dimensi sebelumnya berada di luar-dalam. Ini berkaitan dengan pengaruh faktor eksternal dalam aspek internal sekolah antara lain kurikulum, buku sekolah, metode pengajaran dan sebagainya. Pendidikan rentan dan selalu menjadi sasaran kontestasi kekuasaan, tetapi lebih dari hanya sebagai instrumennya. Oleh karena itu harus dilihat baik sebagai objek maupun sebagai agen.⁶

Perubahan sosial dapat terjadi salah satunya dikarenakan faktor pendidikan dalam setiap manusia. Pendidikan di Insistem barat ialah memperkuat dasar legitimasi bagi penguasa Bumi putra Senada dengan hal tersebut pendidikan yang berlaku di Hindia Belanda tidak terlepas dari tujuan-tujuan dari pemerintah kolonial sendiri. Pada zaman kolonial pemerintah Belanda menyediakan sekolah

⁶ Suwignyo, Agus. "The breach in the dike: regime change and the standardization of public primary-school teacher training in Indonesia, 1893-1969." PhD diss., Leiden University, 2012.

yang beraneka ragam bagi pribumi untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Ciri yang khas dari sekolah-sekolah ini ialah tidak adanya hubungan berbagai ragam sekolah itu. Namun lambat laun, dalam berbagai macam sekolah yang terpisah-pisah itu terbentuklah hubungan-hubungan sehingga terdapat suatu sistem yang menunjukkan kebulatan⁷

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Nederland maupun di Hindia Belanda. Dalam kenyataan hanya anak-anak yang mendapat pelajaran di sekolah berorientasi Barat saja yang dapat melanjutkan pelajarannya, sekalipun hanya terbatas pada segelintir orang saja. Pendidikan yang disuguhkan Belanda sesungguhnya merupakan bagian dari politik pendidikan. Politik pendidikan bukan hanya suatu bagian dari politik kolonial akan tetapi menurut Brugmans, merupakan inti politik kolonial. luas dan jenis pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Belanda bagi anak-anak Indonesia banyak ditentukan oleh tujuan-tujuan politik Belanda yang terutama dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Karena semua masalah pendidikan pada zaman kolonial tak lepas dari masalah-masalah ekonomi.⁸

Pendidikan barat di Indonesia mulai digalakkan semenjak diberlakukan kebijakan politik etis tahun 1900. Semenjak itu pendidikan dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah kolonial Belanda yang dimulai dari Pulau Jawa. Hal

⁷ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Bandung: Penerbit Jemmars Bandung, 1987), hlm.24

⁸ Riski Putri Utami, dalam Skripsi “*Opleiding School Voor Indlansche Ambtenaren (OSVIA) : Pendidikan Bagi Calon Pejabat Pribumi di Madiun 1900-1930*”, (FIB UNAIR, Surabaya) bab 2, hlm 14

tersebut dikarenakan Jawa merupakan pusat dari wilayah kekuasaan Hindia Belanda, terutama di wilayah ibukota kerajaan dan sekitarnya⁹

Pada masa penjajahan Belanda, tahun 1834 daerah kesultanan Banten dijadikan sebagai suatu karesidenan yang meliputi Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak. Jabatan mulai dari Residen hingga seorang Kontrolir selalu dipegang oleh orang Belanda. Sedangkan jabatan mulai dari Bupati kebawah dipegang oleh orang pribumi. Banten kita kenal dari sejarah, sebagai kerajaan Islam yang meniti tangga kejayaan pada abad 16 hingga 19, setelah kerajaan Hindu di Jawa Barat surut pengaruhnya. Dalam cerita sehari-hari sekarang kita mendengar tentang Banten, bahwa orang Banten pemberani dan konon ada yang kebal senjata tajam seperti bisa disebut contohnya pada pertunjukan debus.

Namun Banten sebagai kota yang pernah jaya dibawah system kesultanan yang turun temurun sekitar 250 tahun, kini tinggal sebagai kenangan. Pemerintah yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Sejarah dan Purbakala sejak tahun 1977 mulai memugar Banten Lama untuk dijadikan Taman Purbakala, yang hendak menggambarkan kota Banten abad 16 hingga 19, paling tidak secara fisik, berupa peninggalan bangunan-bangunan serta sisa-sisa bangunan lama. Sungguh pun Banten tidak bergairah dibidang sosial ekonomi, ia mengandung kekayaan budaya. Yang mana kekayaan ini jikalau dipelihara akan berakibat baik bukan hanya untuk kebudayaan, melainkan juga pariwisata dan juga sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Dari beberapa jenis peninggalan yang ada dapat disimpulkan bahwa Banten pada masa lalu merupakan kota yang

⁹ Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri, "*Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901-1942*", *Jurnal Publika Budaya* Vol.1 No.3, Maret 2015, hlm 21.

berkejayaan¹⁰

Perkembangan pendidikan di Banten pada masa Kolonial sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Banten karena pendidikan yang diberikan oleh Belanda sangat penting. Masa Hindia Belanda mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan Barat. Kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih baik. Dengan demikian sistem pendidikan modern baru dikembangkan di wilayah Banten pada awal abad ke-20 ketika ada gerakan politik etis.¹¹ Politik etis mengubah pandangan dalam politik kolonial sehingga pemerintah Belanda beranggapan bahwa Hindia Belanda tidak lagi sebagai *wingewest* (daerah yang menguntungkan), tetapi menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat memenuhi keperluannya dan budaya rakyatnya ditingkatkan.¹² Salah satu jalan menuju tujuan ini adalah dengan memberikan pendidikan Barat secara lebih intensif, maka dari itu, pemerintah Belanda kemudian mengembangkan pendidikan Pangreh Praja yang lebih modern.

Korps Ambtenar Belanda lebih lanjut mendorong terbentuknya pendidikan agar lebih diperluas dan diperdalam. Dengan demikian terbentuklah sekolah pendidikan Pangreh Praja lewat lembaga tertinggi yaitu Bestuurs Academie dan sekolah ini terkenal dengan nama OSVIA.

Awal didirikannya sekolah pamong praja oleh pemerintah Belanda, sistem perekrutan siswa calon Pangreh Praja lebih mengutamakan pada siswa yang berasal

¹⁰ Ateng Winarno, "Menengok Pemugaran Kota Lama Banten: Dulu berjaya seperti Amsterdam". Dalam *Suara Karya*, 2 Agustus 1979. Jakarta.

¹¹ Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri, *op. cit.*, hal 21.

¹² Nina Herlina Lubis, "*Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*", (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 131.

dari kelompok elit, sistem perekrutan pamong praja dilakukan agar efektivitas kepemimpinannya dilapangan tak diragukan. Sistem perekrutan pamong praja yang hanya berasal dari keluarga elit akan mengakibatkan semakin kuatnya kepentingan kolonial Pemerintah Belanda.¹³

Pada dasarnya, OSVIA merupakan sekolah hukum yang lebih mengkhususkan diri pada pendidikan pangreh praja dan jaksa atau di bidang pemerintahan. Sekolah ini hanya menerima lulusan ELS dengan demikian hanya terbatas untuk golongan bangsawan, anak pejabat tinggi pribumi saja, dan orang-orang kaya saja. Lama pendidikannya lima tahun namun pada tahun 1927 dikurangi menjadi tiga tahun.¹⁴

OSVIA didirikan bukan hanya pada satu wilayah saja, melainkan didirikan di beberapa wilayah seperti Serang, Malang, Madiun, Probolinggo, Blitar, Bandung, dan Magelang. Antara OSVIA satu dengan yang lainnya tentu saja memiliki perbedaan dalam proses pelaksanaannya, misalnya saja OSVIA di Serang, OSVIA di Probolinggo, dan OSVIA di Madiun meskipun dengan tujuan yang sama yakni mencetak lulusan menjadi bupati atau Pangreh Praja. Misalnya saja jika di OSVIA Probolinggo menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan, namun di OSVIA yang ada di Serang, Banten menggunakan bahasa Melayu, Belanda, dan bahasa asing lainnya sebagai alat komunikasi mereka.¹⁵ Penggunaan bahasa Melayu dilakukan di sekolah ini agar

¹³ Ricka Yuli Setyani. Sistem Pendidikan Sekolah Pamong Praja Di Malang Tahun 1956-1972. *Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol.3 No.2 Juli 2015. Hal:4

¹⁴ Oloan Sitorus. *Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono*. (Yogyakarta: STPN Press, 2011). Hal:39

¹⁵ Ari Sapto. Kota Probolinggo Pada Masa Menjelang Dan Awal Revolusi. *Jurnal Literasi*

mendapat pengakuan sebagai *lingua franca* oleh pemerintah kolonial Belanda mendorong akselerasi berkembangnya nasionalisme di kalangan bumiputera. Bahasa Melayu ini juga digunakan sebagai senjata untuk melawan pengaruh Belanda. Bahasa melayu menjadi formulasi nyata dalam perlawanan yang tampak dalam Sumpah Pemuda. Sekolah OSVIA di Probolinggo juga menjadi sekolah bumiputera pertama yang ada di Jawa Timur pada saat itu.

Berbicara mengenai OSVIA Madiun, sebelum menjadi OSVIA, sekolah ini dahulu bernama *Hoofdenschool* atau sekolah pemimpin yang merupakan pendidikan khusus untuk anak para raja atau para priyayi tinggi dengan tujuan untuk dijadikan bupati atau patih. *Hoofdenschool* didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan Hindia Belanda pada tahun 1891 yang menyatakan bahwa *Hofdenschool* perlu untuk didirikan karena untuk mendidik anak para raja agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Lulusan dari sekolah ini nantinya akan langsung menduduki jabatan tinggi di masyarakat yang sudah diwariskan secara turun temurun seperti bupati atau patih. Secara otomatis, persyaratan utama untuk mendaftar ke sekolah ini adalah harus berasal dari kalangan priyayi tinggi atau keluarga keraton saja dan untuk masyarakat pribumi biasa tidak diperkenankan. Hal ini didukung oleh peraturan pemerintah saat itu yang menyatakan bahwa orang yang berhak menduduki jabatan tinggi seperti bupati atau patih harus berasal dari golongan ningrat saja. Siswa yang mendaftar di sekolah ini pun harus mendapatkan rekomendasi dari *Inspectur*

Indlandsch Onderwijs atau Inspektur Pendidikan Pribumi dengan syarat mempunyai penghasilan ekonomi diatas rata-rata.¹⁶ Namun, OSVIA di Madiun ini tidak bertahan lama, hanya sampai di tahun 1983 saja karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor tersebut adalah munculnya berbagai aksi dari siswa dengan tujuan pemberontakan terhadap pendidikan kolonial Barat yang ada di sekolah OSVIA Madiun ini.

Berbeda dengan OSVIA di Madiun yang menjadikan kasta tertinggisebagai syarat untuk mendaftar dan menempuh pendidikan, OSVIA di Serang Banten justru melakukan sebaliknya. OSVIA di Serang, Banten menerima pendaftaran siswa dari semua kalangan masyarakat agar rakyat Banten dapat merasakan pendidikan bergaya barat, belajar membaca, menulis, berhitung, administrasi, ilmu hukum, serta dapat menguasai bahasa Belanda maupun bahasa asing lainnya. Hal inilah yang membedakan OSVIA Serang berbeda dengan OSVIA yang lainnya. Dengan demikian, banyak masyarakat Serang, Banten pada saat itu yang menyekolahkan anaknya di OSVIA dan beranggapan bahwa mereka dapat meningkatkan derajat keluarga agar dapat menjadi pegawai yang dihormati oleh rakyat Banten.¹⁷ Hal tersebut sesuai dengan peraturan pengangkatan bupati yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1913 yang menyatakan bahwa keturunan seseorang bukanlah syarat utama untuk menjadi seorang bupati atau dengan kata lain siapa saja yang memenuhi kriteria untuk menjadi bupati bukan hanya dari anak atau kerabat bupati. Ternyata peraturan ini mendapat kritikan dari

¹⁶ Riski Putri Utami. *Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren* (OSVIA): “Pendidikan Bagi Calon Pejabat Pribumi di Madiun Tahun 1900-1938”. *Jurnal Kesejarahan* Vol.11 No.2, Desember 2017. Hlm. 5

¹⁷ Mufti Ali, “*KH. TB. Achmad Chatib (1890-1966)*”, (Banten: Yayasan Bhakti Banten, 2020), hlm 19.

elite priyayi dan bangsawan Banten yang mengajukan keberatan akan peraturan tersebut. Para elit priyayi memberikan tanggapan bahwa peraturan bertentangan dengan asas pewarisan jabatan.

Akan tetapi, hanya sebagian elite priyayi berpendidikan yang berani protes secara langsung. Ada yang melakukan protes dengan cara membuat tulisan dalam bentuk karya sastra. Sebaliknya reformasi pendidikan tentang aturan untuk menjadi bupati disambut gembira oleh para amtenar yang bukan keturunan ningrat. Koran pribumi memberikan berita tentang masalah pro dan kontra tentang peraturan penghapusan asas pewarisan sehingga Pemerintah Kolonial mengubah peraturan tersebut tahun 1921 dengan menetapkan pengangkatan bupati baru berdasarkan asas keturunan, memenuhi persyaratan minimal lulusan OSVIA.

Pemerintah Hindia Belanda menginginkan birokrasi modern untuk menekankan perekrutan para pejabat berdasarkan atas kualifikasi profesional, promosi atas asas senioritas, keahlian, dan prestasi. Di lain pihak birokrasi pribumi yang patrimonial menekankan perekrutan pejabat atas dasar hubungan kekerabatan antara para bupati. Terbukti dengan terjadinya pergeseran elite, kaum Ningrat dan Menak tidak lagi menjadi pemain utama dalam panggung politik di Banten. Terbukti setelah dibuka sekolah OSVIA menekankan bahwa pendidikan akan menjadi suatu prioritas pergantian sebuah rezim yang baru. Dampak lain dari bersekolah di OSVIA adalah para pelajarnya menunjukkan bahwa keluarga pegawai rendah atau bahkan ayahnya tidak bekerja di Pemerintahan Belanda dapat menyekolahkan anak di OSVIA tanpa memandang dari status sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pendidikan OSVIA pada masa Kolonial Belanda di Serang Banten pada tahun 1910- 1927 dan dampak keberadaannya. Oleh sebab itu, peneliti melakukan sebuah penelitian yang berjudul “OSVIA Serang : Pendidikan Bagi Calon Pejabat Pribumi Di Serang Banten 1910-1927”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan OSVIA pada masa Kolonial Belanda di Serang Banten pada tahun 1910-1927?
2. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Serang dan sekitarnya dari adanya OSVIA di Serang Banten?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan pada masa Kolonial Belanda di Serang Banten pada tahun 1910-1927.
2. Menjelaskan dampak keberadaan OSVIA Serang Banten terhadap perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Serang dan sekitarnya.

Tujuan utama pemerintah Hindia Belanda memberikan pendidikan kepada golongan Bumiputra adalah mendapatkan tenaga terdidik dengan biaya murah. Sebab bila pegawai untuk administrasi pemerintahan ataupun pekerja bawahan harus didatangkan langsung dari Negeri Belanda, sudah tentu memerlukan biaya

yang besar.

Sehubung dengan hal tersebut, penelitian mengenai sejarah pendidikan OSVIA di Serang Banten menjadi salah satu bentuk kajian sejarah yang menari, karena lembaga pendidikan tersebut telah berhasil menghasilkan berbagai lulusan berupa calon pegawai pemerintahan yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Serang Banten.

Manfaat penulisan ini secara umum adalah untuk menjelaskan tentang keberadaan OSVIA, Sekolah bagi calon pejabat pribumi di Serang Banten yang diharapkan dapat memberikan sumbangan besar bagi keilmuan terutama bagi penulisan sejarah pendidikan di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini dibatasi oleh batasan spasial dan temporal. Kota Serang dipilih sebagai batasan spasial karena merupakan ibu kota dari Karesidenan Banten. Yang mana Banten ini merupakan daerah pelabuhan yang ramai dan memiliki sumber daya melimpah juga menguntungkan dalam segi ekonomi. Serang juga dalam aspek historis yakni memiliki kaitan dengan kesultanan Banten, hal tersebut turut menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah kolonial Belanda untuk mendirikan lembaga pendidikan bagi para bangsawan pribumi untuk di pekerjaan dalam jajaran korps pemerintah pribumi.

Selain itu pendidikan di Jawa Barat, khususnya di Banten hanya ada 2 sekolah. Tujuan pendirian lembaga pendidikan oleh Belanda adalah untuk mendidik tenaga kerja yang akan mengerjakan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda. Kepentingan untuk mencari pegawai yang murah agar dapat dijadikan

pegawai tanpa mendatangkan pegawai dari Negeri Belanda. Oleh karena itu, Belanda membentuk sekolah Pangreh Praja untuk memenuhi kebutuhan pegawai sampai menjadi pimpinan Bupati. Belanda kemudian mendirikan sekolah Pangreh Praja di Serang Banten¹⁸

Adapun batasan temporal yaitu tahun 1910 hingga 1927. Tahun 1910 dipilih menjadi awal tahun penelitian karena tahun tersebut merupakan awal berdirinya OSVIA di Serang Banten melalui Direktur Pendidikan Hindia Belanda di Serang. Hal ini juga sejalan dengan kemajuan yang pesat pada pendidikan dasar di Hindia Belanda dalam dua dasawarsa pertama setelah tahun 1900. Sehingga dapat diketahui penyelenggaraan pendidikan seperti apa yang diberikan oleh OSVIA di Serang Banten dari mulai awal berdirinya hingga samapi terbentuknya kemajuan-kemajuan yang pesat dari pendidikan yang dapat dilihat setelah tahun 1900an.¹⁹

Pada tahun 1927 menjadi batasan akhir pada penelitian ini karena pada tahun tersebut OSVIA Serang ditutup oleh pemerintah Kolonial Belanda. Penutupan OSVIA di Serang tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran pemerintah kolonial ketika mengetahui bahwa disekolah tersebut mulai muncul kesadaran dari para siswa OSVIA terhadap nasionalisme yang diwujudkan dengan berbagai aksi pemberontakan.²⁰

¹⁸ Syaharudin dan Heris Susanto, *Sejarah Pendidikan Indonesia: Era Pra Kolonialisme Nusantara Sampai Reformasi*. (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2019). hlm 37-39

¹⁹ Nina Herlina Lubis, *op., cit.*, hlm. 131

²⁰ Riski Putri Utami, dalam Skripsi “*Opleiding School Voor Indlansche Ambtenaren (OSVIA) : Pendidikan Bagi Calon Pejabat Pribumi di Madiun 1900-1930*”, (FIB UNAIR, Surabaya) bab I , hlm. 7.

1.5 Kerangka Konsep

OSVIA Serang merupakan sekolah pendidikan yang ditujukan untuk calon-calon pegawai Bumiputra padazaman Hindia Belanda. Nantinya setelah lulus dari sekolah tersebut mereka yang menempuh pendidikan di OSVIA akan dipekerjakan dalam pemerintahan colonial sebagai pamong praja. Sehingga dapat dikatakan OSVIA Serang merupakan wadah Pendidikan Bagi Calon Pejabat Pribumi di SerangBanten 1910-1927. Selain itu OSVIA juga memiliki sisi sosio-historisnya sendiri, karena tidak hanya menggambarkan bagaimana pendidikan diselenggarakan di sekolah tersebut tetapi juga menggambarkan perubahan sosial yang terjadi akibat keberadaan sekolah OSVIA di Serang.

Dalam kehidupan sosialnya, kelompok priyayi menempati tempat yang penting dan dianggap sebagai kelompok yang berharga dalam kehidupan masyarakat Bumiputera. Menurut Robert van Niel, kelompok priyayi merupakan sebuah kelompok yang sosial yang ada pada tahun 1900-an, dimana kelompok tersebut berdiri untuk memberikan pembelaan terhadap rakyat kurang mampu dengan memberikan pembimbingan serta memimpin rakyat kurang mampu.²¹

Sesuatu yang bernilai dalam masyarakat luas dapat berupa uang, benda-benda yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, pengetahuan, ketaqwaan, atau garis keturunan.²² Demikian pula, status priyayi juga ditingkatkan dengan banyak tanda kebesaran.²³

Menurut Soerjono Soekanto, tingkatan kelas sosial dalam kehidupan priyayi

²¹ Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: UGM Press, 1987), hlm. 4.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.216

²³ Sartono Kartodirdjo, dkk. 1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987) hlm.19.

meliputi tingkatan yang berbeda-beda. Kelompok ini terbagi menjadi priyayi lama dan priyayi baru. Sesebuah Priyayi adalah priyayi yang telah memiliki pengalaman pendidikan dalam peradaban priyayi. Ini adalah kelompok priyayi yang berasal dari lingkungan keraton, dan dididik secara turun temurun dalam keluarga priyayi.

Berbeda dengan kasus priyayi baru, di mana kelompok ini terdiri dari priyayi yang tinggal di kota-kota kecil, seperti kabupaten, yang dididik melalui lulusan SMA seperti lulusan SMA OSVIA. Status priyayi mereka dicapai melalui pendidikan, bukan oleh nenek moyang. Priyayi baru memegang posisi semi-profesional di bidang kedokteran, pertanian, peternakan, universitas dan banyak sektor pemerintahan lainnya. Sebagai sekelompok karyawan, priyayi baru mengontrol aturan kehidupan kelompok di priyayi lama. Melalui pendidikan ini, priyayi baru dapat mencapai kedudukan yang sama dengan priyayi lama. Para priyayi memperoleh ilmu hanya melalui lembaga pendidikan, sehingga secara teknis mereka sangat memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan.

Pendirian sekolah-sekolah bergaya Barat di Hindia Belanda turut mendukung perubahan sosial di kalangan masyarakat adat. Lembaga pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dioperasikan di luar kerangka kehidupan tradisional. Pada awal abad ke-20, ada "tren kolonial baru" yang diwujudkan dalam politik moral, yang berusaha meningkatkan standar kebahagiaan masyarakat adat. Akibatnya terjadi perubahan pendidikan yang ditempuh priyayi, yang semula pendidikan priyayi berbasis kurikulum tradisional, berubah menjadi pendidikan yang menerapkan kurikulum barat.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosantoso dalam bukunya *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, awalnya pendidikan dengan menggunakan sistem barat ini memiliki tujuan agar dasar legitimasi atau legitimasi dari penguasa-penguasa yang ada pada Bumiputra dapat lebih diperkuat. Ajaran Barat membuat mereka lebih percaya diri karena telah mengumpulkan dua sumber legitimasi, yaitu keturunan berpengaruh seperti bangsawan dan ajaran Barat, yang membantumereka menengahi dengan penguasa asing. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Barat merupakan sumber modal awal menuju perubahan bagi kaum priyayi agar status mereka dapat dipertahankan sebagai kelompok elit dalam masyarakat adat.²⁴

Menurut Anak Agung Gde Putra Agung dalam bukunya *Peralihan Sistem Birokrasi Dari Tradisional Ke Kolonial*, menjelaskan dampak kekuasaan kolonial terhadap perubahan sosial sejalan dengan proses modernisasi dan westernisasi. Pembukaan sekolah osvia ini pada awalnya bertujuan untuk mempersiapkan tenaga administrasi kolonial, yang dalam perkembangan selanjutnya juga memunculkan kelas baru dalam masyarakat, munculnya elit modern. Pemilihan staf untuk kantor Nederlandsch-Bestuur tidak didasarkan pada faktor genetik, tetapi juga pada faktor pendidikan.

Birokrasi pemerintahan sipil Belanda telah mengarah pada profesionalisme dan sekolah menjadi contoh bagi pegawai pemerintah daerah dalam bekerja, disiplin, dan bertanggung jawab atas tugasnya, sesuai dengan perilaku birokrasi modern. Pendidikan Barat dalam perkembangannya kemudian

²⁴ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosantoso, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 146.

mengalami daya tarik tersendiri karena mendahului perolehan posisi dalam institusi dan kekuasaan. Sistem pendidikan Barat dan birokrasi kolonial yang mengarah pada birokrasi modern memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Kelas terpelajar lambat laun ingin menduduki posisi yang sama dengan kaum bangsawan, meskipun kebijakan kolonial ingin mempertahankan struktur yang ada. Pergeseran dari birokrasi tradisional ke birokrasi kolonial menyebabkan perpindahan sosial; hal ini dapat dilihat dalam evolusi sistem sosial, kelas ekonomi dan posisi politik.²⁵

Tujuan pendidikan orang-orang belanda itu sejalan dengan kebijaksanaan politik dan usaha mereka untuk melestarikan kekuasaannya di Nusantara, sehingga isi dan proses pihak-pihak yang terlibat di dalamnya disesuaikan dengan itu, di antaranya melalui pengajaran bahasa belanda. Slamet Imam Santoso, seorang pemerhati tentang masalah- masalah pendidikan di Indonesia, memperingatkan betapa pentingnya peranan bahasa dalam pendidikan.²⁶

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah faktor pendidikan setiap orang. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan pertumbuhan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Keterkaitan OSVIA dengan munculnya priyayi modern, serta kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap status priyayi, secara tidak langsung

²⁵ Anak Agung Gde Putra Agung, *Peralihan Sistem Birokrasi Dari Tradisional Ke Kolonial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hlm. 6.

²⁶ Djohan Makmur, Dkk, *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Jakarta: Manggala Bhakti, 1993), Hlm. 30.

membawa perubahan sosial bagi masyarakat Madiun. Perubahan-perubahan tersebut, seperti munculnya pendidikan priyayi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda, munculnya jabatan-jabatan baru dalam badan pemerintahan, dan munculnya persepsi etnisitas sosialisme melalui pendidikan menurut model pendidikan Barat. Inilah dampak dari keberadaan OSVIA Serang.

Pada masa penjajahan Belanda, priyayi tidak hanya mengacu pada keluarga keraton dan sejenisnya. Kebutuhan akan pegawai pribumi yang berpendidikan telah membuka pintu bagi seluruh lapisan masyarakat untuk maju menjadi priyayi. Pendidikan menjadi modal awal bagi kaum wong cilik untuk mendobrak keterbatasan statusnya. Pendirian sekolah-sekolah Barat di Karesidenan Banten memiliki peranan yang sangat penting dalam melahirkan elit modern. Mereka adalah kelompok terpelajar yang ikut berperan dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjalankan fungsinya ketika sebagian besar masyarakat pribumi belum bisa mengenyam pendidikan modern. Fungsi fungsi lain yang dijalankan oleh elit modern di Banten antara lain sebagai dokter, guru, juru rawat, dan lain-lain. Bupati-bupati di *Karesidenan* Banten pada abad ke-20 adalah elit terpelajar. Hasil didikan sekolah barat, seperti Bupati Banten Lor Ahmad Djajadiningrat alumni OSVIA sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera di Serang Banten.

Walaupun nampak cukup baik tujuan didirikan bentuk-bentuk persekolahan di Hindia Belanda, namun dalam prakteknya, terdapat kecenderungan diskriminatif. Kecenderungan itu nampak dalam hal cara menyaring masih anak sekolah. Caranya dengan memberlakukan biaya sekolah

yang cukup mahal, dan juga sering diutamakan bagi keluarga keturunan darah biru (darah Ningrat, darah Kraton) atau dari kalangan para “priyayi” (Pangreh Praja atau Pegawai kantor Pemerintahan Hindia Belanda). Oleh karena itu, bagi kalangan masyarakat bawah, hanya dari anggota masyarakat yang mampu atau kaya saja yang dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Politik etis mengubah pandangan dalam politik kolonial sehingga pemerintah Belanda beranggapan bahwa Hindia Belanda tidak lagi sebagai Wingewest (daerah yang menguntungkan), tetapi menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dan budaya rakyatnya ditingkatkan.²⁷ Salah satu jalan menuju tujuan ini adalah dengan memberikan pendidikan Barat secara lebih intensif.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan penyelenggaraan sekolah yang dilakukan Belanda tidak murni semata-mata sebagai pemberdayaan pendidikan kepada masyarakat, melainkan untuk menghasilkan tenaga birokrat (level pendidikannya) untuk dapat direkrut dalam jabatan-jabatan teknis di Pemerintahan Kolonial Belanda.

Lulusan OSVIA membentuk sebuah paradigma baru tentang Pangreh Praja dan dipandang sebagai inti kepegawaian sipil modern di masaselanjutnya. Ini dapat dilihat dari para pejabat yang lebih tua dan kurang tinggi pendidikannya mulai pensiun maka lulusan OSVIA ini akan semakin menjadi ciri korps dan adanya pergerseran sosial di kalangan pelajar OSVIA memberi petunjuk bahwa Pangreh

²⁷ Dr. Abdullah Idi, “*Politik Etnisitas Hindia Belanda*”. (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 4.

Praja di masa yang akan depan semakin berkurang sifat aristokratisnya. Seiring dengan semakin dalamnya kekuasaan Kolonial, semakin kelihatan pula bahwa kaum Pangreh Praja yang terdiri dari para bupati dan aparatnya berperan sebagai perantara Pemerintah Kolonial dengan rakyat. Pangreh Praja menjadi kepanjangan tangan pemerintah Kolonial, rakyat merasa Pangreh Praja tidak berguna karena hak-hak rakyat tidak pernah didengar bahkan Pangreh Pangreh Prajanya kepentingan Kolonial saja.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang sejarah pendidikan telah banyak disinggung oleh beberapa penulis seperti buku yang berjudul *Sejarah Pendidikan Indonesia* karya S. Nasution.²⁸ Buku tersebut memberikan informasi mengenai perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia dalam berbagai aspek seperti kurikulum, buku pelajaran, Guru, inspeksi, murid, fasilitas, penerimaan dan populasi murid, penerimaan calon guru, rangkuman dan tinjauan. Dalam buku tersebut memberikan pemahaman tentang sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil dari perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita. Pendidikan tidak berdiri sendiri akan tetapi senantiasa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi dan kultural.

Buku ini terutama menyoroti suatu periode tertentu dalam sejarah pendidikan Indonesia, yakni periode 1892 sampai 1920. Menurut penulis, masa ini merupakan masa yang paling menarik dalam sejarah perkembangan pendidikan Indonesia, oleh sebab dalam periode inilah kita lihat terbentuknya suatu sistem

²⁸ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Bandung: Penerbit Jemmars Bandung, 1987).

pendidikan yang lengkap di Indonesia yang memungkinkan anak Indonesia belajar dari tingkat sekolah paling rendah sampai menyelesaikannya pada tingkat sekolah yang paling tinggi di bumi Indonesia. Akan tetapi, pemaparan waktu dari pendidikan atau sekolah yang pernah ada dalam buku ini tidak urut dari waktu ke waktu. Walau begitu, buku ini bisa menjadi acuan dalam mengantarkan pada sebuah refleksi pendidikan di Indonesia masa kini.

Berbagai tulisan dengan tema yang sama juga digumakan oleh peneliti sebagai pertimbangan. Seperti buku yang berjudul *Sejarah pendidikan Daerah Jawa Barat* karya Edi S. Ekajati dkk. Buku tersebut memberi informasi pendidikan di Jawa Barat, termasuk adanya OSVIA di Serang Banten. Buku ini juga memuat uraian tentang pertumbuhan pendidikan di Jawa Barat, mulai dari tradisional, pendidikan Barat abad ke-19, pendidikan formal abad ke-20, sampai pendidikan zaman Jepang dan Indonesia pada masa kemerdekaan.²⁹ Hanya saja, dalam buku ini kurangnya penjabaran tentang perbandingan pendidikan di Jawa Barat dengan daerah lain. Yang mana hal ini sejatinya bisa menjadi informasi tambahan sebagaibahan penelitian.

Buku selanjutnya yaitu *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* karya Heater Sutherland.³⁰ Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai berbagai kritik terhadap pola, sistem, dan struktur pemerintahan. Termasuk juga mengenai pengaruh-pengaruh dari perubahan tata pemerintahan tradisional Jawa yang dihadapkan dengan pemerintah kolonial Belanda. Dalam buku ini penulis melakukan kajian

²⁹ Edi S. Ekajati dkk, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998), hlm.vii.

³⁰ Heater Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).

terhadap karir dan kedinastian pegawai lokal Jawa di masa Kolonialisme. Sutherland melakukan penelitian tentang peran sosial politik para elit priyayi terhadap perubahan administratif yang menyebabkan adanya suatu dikotomi kepentingan dari adanya sebuah kekuasaan. Disinggung juga pola hubungan aristokrat Jawa dengan Kolonial Belanda. Namun, kajian penelitian dalam buku ini lebih kurang banyak menyinggung masyarakat yang erat hubungannya sebagai subjek yang mereka perintah.

Berikutnya adalah buku penting yang terkait spasial tema penelitian yaitu *Banten dalam Pergumulan Sejarah* karya Nina Herlina Lubis.³¹ Buku ini sangat membantu memberikan keterangan tentang daerah Banten dan Kota Serang pada khususnya mengenai dinamika situasi politik, sosial, ekonomi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beberapa hal terkait yang disuguhkan dalam buku ini yaitu mengenai sistem pemerintahan, perubahan politik dan sistem pemerintahan kolonial, kehidupan perekonomian, gerakan sosial, kehidupan sosial budaya termasuk pendidikan. Namun, dalam buku ini hanya membahas sekilas saja tentang pendidikan yang pernah ada di Banten, tanpa keterangan lebih detail sebagaimana jalannya sekolah atau sistem yang digunakan pada masa kolonial khususnya.

Kemudian peneliti menggunakan skripsi serupa dengan tema penelitian namun berbeda dalam batasan spasial, yakni jurnal berjudul *Opleiding School Voor Indlandsche Ambtenaren (OSVIA) : Pendidikan Bagi Calon Pejabat*

³¹ Nina Herlina Lubis, "*Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*", (Jakarta: LP3ES, 2003).

Pribumi di Madiun Tahun 1900-1930 oleh Riski Putri Utami.³² Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang OSVIA tetapi yang berada di Madiun, Jawa Timur. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya dampak perubahan sosial masyarakat pribumi di Madiun yaitu berupa terciptanya elite modern yang duduk di singgasana jabatan birokratis dari kalangan priyayi terpelajar. Para pangreh praja hasil dari pendidikan Belanda memainkan peran yang penting, tidak hanya sebagai perpanjangan tangan Belanda namun juga sebagai pelayan masyarakat pribumi. Namun, selain adanya perbedaan spasial, hasil penelitian dari skripsi ini juga hanya terpusat pada penelitian khusus dari letak OSVIA itu sendiri yaitu Madiun, dengan tidak membandingkan dari OSVIA lain yang bisa jadi gambaran secara umumnya.

Hasil studi yang telah diuraikan di atas menunjukkan masih diperlukan suatu penulisan sejarah lokal di Serang terutama sejarah pendidikan masa kolonial yang khusus membahas mengenai pendidikan OSVIA Serang pada masa kolonial. Hingga kini belum banyak penelitian yang mengkaji OSVIA Serang secara detail, dari awal perkembangan hingga munculnya dampak sosial pada masyarakatnya. Demikian penulisan ini memiliki studi yang berbeda dengan penulisan OSVIA yang lebih dahulu. Penelitian mengenai OSVIA ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penulisan sejarah sosial di Indonesia serta sejarah lokal di Serang.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian didasarkan pada tahap-tahap dalam metode sejarah, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber data, verifikasi, interpretasi, analisis

³² Riski Putri Utami, dalam Skripsi “*Opleiding School Voor Indlansche Ambtenaren (OSVIA) : Pendidikan Bagi Calon Pejabat Pribumi di Madiun 1900-1930*”, (FIB UNAIR, Surabaya).

dan sintesis, serta penulisan.³³ Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan sumber buku, arsip, foto, surat kabar maupun majalah baik yang terbit padatahun terkait maupun yang terbit sesudahnya. Penelusuran sumber-sumber ini dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Kota Serang, Perpustakaan Pusat Kampus B UNAIR, Perpustakaan Departemen Ilmu Sejarah FIB UNAIR, Ruang Baca FIB UNAIR serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dan juga penulis dapatkan dari situs website www.delpher.nl dan juga www.kitlv.nl. Sumber tersebut di bagi dua yaitu :

1. Sumber Primer

Arsip (1) Binnenland Bestur No. 147, arsip jenis dokumenadministrasi ini berisi keterangan seputar sekolah OSVIA Serang serta daftar lulusannya. (2) Koleksi foto-foto bangunan serta siswa dan tenaga pengajar sekolah OSVIA Serang. Arsip ini didapatkan dari media arsip online www.delpher.nl dan KITLV <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/> ;

2. Sumber Sekunder

a. Majalah

Dalam majalah Suara Karya berjudul “Menengok Pemugaran Kota Lama Banten: Dulu berjaya seperti Amsterdam” yang ditulis Ateng Winarno, Jakarta tahun 1979.

³³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000), hlm. 91.

Tulisan ini membahas seputar Banten pada masa kesultanan sampai jatuhnya ketangan kolonial. Majalah ini sedikit banyak membantu dalam penulisan khususnya sejarah Banten sebagai fokus spasial.

b. Buku

Buku-buku berjudul : *Sejarah Pendidikan Indonesia, Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat, Terbentuknya Elite Birokrasi, dan Banten dalam Pergumulan Sejarah*. Di dalam buku tersebut diuraikan tentang sejarah pendidikan di Banten khususnya serta sejarah Banten itu sendiri.

c. Skripsi

“Opleiding School Voor Indlansche Ambtenaren (OSVIA) : Pendidikan Bagi Calon Pejabat Pribumi di Madiun 1900-1930”. Ditulis oleh Riski Putri Utami mahasiswa FIB UNAIR tahun 2016. Serta dalam skripsi : *Perkembangan Kesultanan Banten Pada Masa Pemerintahan Sultan Maulana Yusuf (1570-1580)*” oleh TB. Umar Syarif Hadiwibowo mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNY 2013. Skripsi ini menjadi acuan penting karena setema dengan penelitian.

d. Artikel/Jurnal

Artikel atau jurnal ini didapatkan dari media online sebagai bahan pustaka pendukung yang berkaitan dengan tema penelitian.

Tahap kedua adalah verifikasi atau kritik sumber. Kritik terhadap sumber terdiri dari kritik ekstern terhadap otentikitas, asli, tiruan, palsu, serta relevan tidaknya suatu sumber. Kritik intern yaitu pengujian terhadap isi atau kandungan sumber. Tujuan kritik adalah untuk menyeleksi data dan fakta. Dengan adanya banyak data, penulis diwajibkan untuk memilih-memilah data tersebut mana yang paling otentik atau mendekati kebenaran. Tahap ketiga yang dilakukan adalah menginterpretasi sumber-sumber tersebut, dalam tahapan ini sumber-sumber yang diperoleh dipahami, dianalisa dan digambarkan secara luas dan jelas. Sehingga membentuk sebuah rangkaian cerita antara satu sumber dengan sumber lainnya.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu melakukan penulisan atas penelitian yang kita lakukan agar penelitian kita dapat tercatat dan digunakan untuk manfaat dan tujuannya. Pada tahapan inilah peneliti dituntut untuk menulis dengan bahasa yang baik, benar dan mudah dipahami.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian mengenai OSVIA Serang : Pendidikan Bagi Calon Pejabat Pribumi di Serang Banten 1910-1927 akan disajikan dalam 4 bab. Bab di bagi atas sub bab untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci.

Bab I adalah pendahuluan yang membahas tentang mengenai latar belakang masalah penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.³⁴

³⁴ Wasino, dkk. *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm 12.

Bab II menjelaskan gambaran umum dan socio-kultural Serang Banten; serta pendidikan masa kolonial secara umum di Serang Banten.

Bab III menjelaskan mengenai lahir dan berkembangnya OSVIA, penyelenggaraan pendidikan OSVIA pada masa Kolonial Belanda di SerangBanten pada tahun 1910-1927 meliputi sejarah lahirnya OSVIA Serang, kegiatan belajar mengajar dan kurikulum, kebijakan sekolah OSVIA Serang, alumni OSVIA Serang, serta dampak keberadaan OSVIA di SerangBanten bagi bidang kehidupan sosial masyarakat Serang dan sekitarnya, penyebab penutupan OSVIA Serang, serta perhimpunan alumni OSVIA Serang.

Bab IV di dalamnya berisi simpulan, yang merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Bab ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang ditinjau dari pembahasan-pembahasan yang sudah ditulis pada bab-bab sebelumnya.